

ANALISIS PERGESERAN EKONOMI PASCA TAMBANG DAN KEBIJAKAN AGROINDUSTRI BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN TIMUR

ANALYSIS OF POST-MINING ECONOMICS TRANSFORMATION AND SUSTAINABLE AGRO-INDUSTRY POLICIES IN EAST KALIMANTAN ¹

Gigih Widya Wirawan², Ahmad Rizal Fahmi³, Jauchar Barlian⁴, Dewi Sartika⁵

Email: gieh01@gmail.com

ABSTRACT

East Kalimantan Province has relied on the extractive sector, particularly coal and oil and gas mining, for decades as a primary source of economic growth, regional revenue, and employment. However, dwindling natural resource reserves, fluctuating global commodity prices, and growing awareness of environmental impacts are driving the need for structural transformation toward a more sustainable economy. This study aims to analyze the extent of the shift or transformation of the post-mining economy in East Kalimantan and the Agro-industry policy in East Kalimantan by comparing the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in East Kalimantan in 2013, 2018, and 2023, using the Location Quotient (LQ) analysis approach as an instrument to see the shift and growth of the economic sector base in East Kalimantan and comparing the documents of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of East Kalimantan Province in 2014-2018 and 2019-2024 to see the tendency of shifts in political policies related to agro-industry and food security in East Kalimantan. Based on the LQ analysis, the economy in East Kalimantan remains generally dependent on the extractive sector, namely the mining sector. The agriculture, forestry, and fisheries sectors have considerable potential for further development as a regional economic base to meet food security. The manufacturing sector, as a form of industrial downstreaming, has not yet been optimally developed to boost the regional economy. Regional government development policies for the 2013-2018 and 2019-2023 periods have sought to encourage post-mining economic transformation by optimising the added value of local commodities through industrialisation/product downstreaming. The policy recommendation is the need for a post-mining economic transformation roadmap and to encourage the development of new economic clusters based on agro-industry, bioenergy and the food industry to reduce extractive commodities. Because the analysis period is in the two RPJMD periods 2013-2018 and 2019-2023, further research is needed that analyzes the next RPJMD period.

¹ Diterima tanggal 15 September 2025, Direvisi 17 Oktober 2025

² Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

³ Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

⁴ Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

⁵ Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik - Lembaga Administrasi Negara

Keywords: *Post-Mining Policy, Economic Transformation, Location Quotient, Sustainable Agroindustry Policy, East Kalimantan Province*

ABSTRAK

Provinsi Kalimantan Timur selama beberapa dekade bertumpu pada sektor ekstraktif, khususnya pertambangan batubara dan migas, sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah, serta penyerapan tenaga kerja. Namun, menurunnya cadangan sumber daya alam, fluktuasi harga komoditas global, serta meningkatnya kesadaran terhadap dampak lingkungan mendorong perlunya transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana pergeseran atau transformasi ekonomi pasca tambang di Kaltim dan kebijakan Agroindustri di Kalimantan Timur dengan membandingkan Produk Domestik Regional bruto (PDRB) di Kaltim tahun 2013, 2018, dan 2023, dimana menggunakan pendekatan analisis Location Quotient (LQ) sebagai instrumen untuk melihat pergeseran dan pertumbuhan basis sektor ekonomi di Kaltim serta membandingkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2018 dan tahun 2019-2024 untuk melihat kecenderungan pergeseran kebijakan politik terkait agroindustri dan ketahanan pangan di Kaltim. Berdasarkan analisis LQ, secara umum ekonomi di Kalimantan Timur masih bergantung pada sektor ekonomi ekstraktif yakni sektor pertambangan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cukup potensial untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu ekonomi basis wilayah dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan. Sektor manufaktur sebagai bentuk hilirisasi industri masih belum dikembangkan secara optimal dalam mengungkit perekonomian daerah. Kebijakan pembangunan pemerintah daerah pada periode 2013-2018 dan 2019-2023 telah berupaya mendorong terwujudnya transformasi ekonomi pasca tambang, melalui optimalisasi nilai tambah komoditas lokal melalui industrialisasi/ hilirisasi produk. Rekomendasi kebijakan adalah perlunya peta jalan transformasi ekonomi pasca tambang dan mendorong pengembangan klaster ekonomi baru berbasis agroindustri, bioenergi dan industri pangan untuk mengurangi komoditas ekstraktif. Karena periode analisis pada dua periode RPJMD 2013-2018 dan 2019-2023 sehingga perlu riset selanjutnya yang menganalisis pada periode RPJMD selanjutnya. Because the analysis period is in the two RPJMD periods 2013-2018 and 2019-2023, further research is needed that analyzes the next RPJMD period.

Kata Kunci: Kebijakan Pasca Tambang, Transformasi Ekonomi, Location Quotient, Kebijakan Agroindustri berkelanjutan, Provinsi Kalimantan Timur

A. PENDAHULUAN

Sebagian besar perekonomian Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur ditopang oleh sektor migas dan pertambangan. Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur menyadari bahwa sektor ekonomi ekstraktif yang mengandalkan sumber daya alam tidak terbaharui misal minyak gas dan pertambangan adalah sektor yang tidak

berkelanjutan, sehingga sejak tahun 2008 telah dicanangkan upaya untuk menggeser perkembangan perekonomian daerah pada sektor agroindustri sebagai alternatif penopang ekonomi wilayah pasca habisnya sumber daya alam di Kaltim, sebagaimana termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur selama beberapa dekade bertumpu pada sektor ekstraktif, khususnya pertambangan batubara dan migas, sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi, penerimaan daerah, serta penyerapan tenaga kerja. Namun, menurunnya cadangan sumber daya alam, fluktuasi harga komoditas global, serta meningkatnya kesadaran terhadap dampak lingkungan mendorong perlunya transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pergeseran ekonomi pasca tambang bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, agroindustri berkelanjutan muncul sebagai salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk menggantikan ketergantungan terhadap sektor tambang. Kalimantan Timur memiliki keunggulan berupa ketersediaan lahan potensial, keberagaman komoditas pertanian dan perkebunan, serta peluang integrasi dengan industri pengolahan modern. Transformasi menuju agroindustri berkelanjutan juga sejalan dengan agenda nasional terkait penguatan

ketahanan pangan, pengembangan bioindustri, dan ekonomi hijau.

Pergeseran ekonomi pasca tambang menuntut adanya kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan agroindustri yang tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta penguatan rantai pasok. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur penunjang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi teknologi pertanian, pemanfaatan lahan pasca tambang untuk pertanian produktif, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal.

Lebih jauh, dinamika pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara yang berada di Kalimantan Timur memberikan momentum strategis bagi percepatan transformasi ekonomi daerah. Tingginya permintaan komoditas pangan, bahan baku industri, dan produk olahan membuka peluang besar bagi pengembangan klaster agroindustri modern. Namun, peluang tersebut memerlukan kerangka kebijakan yang akomodatif, inklusif, dan responsif terhadap tantangan ekologis, seperti degradasi lahan, perubahan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Transformasi ekonomi pasca tambang Kalimantan Timur terhambat oleh dominasi sektor ekstraktif, degradasi lahan, infrastruktur dan SDM agroindustri yang belum siap, lemahnya

integrasi kebijakan, kurangnya investasi hijau, serta belum optimalnya pemanfaatan peluang IKN. Untuk itu, diperlukan kebijakan agroindustri berkelanjutan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berbasis ekologi.

Beberapa studi relevan yang pernah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Tika, dkk, 2020	Klasifikasi Pertumbuhan Sektor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manokwari Tahun 2013-2017	Diperoleh 10 sektor basis yaitu: Pertambangan dan Penggalian, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor <i>Real Estate</i> , Sektor Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Ditemukan pula bahwa sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat antara lain Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Sektor Limbah dan Daur Ulang, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor <i>Real Estate</i> , Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
Sinton, 2018	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan	Pengeluaran fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Ketiga fungsi tersebut memengaruhi IPM dengan jalur yang berbeda di mana fungsi ekonomi dan pendidikan berpengaruh melalui variabel PDRB, sedangkan fungsi kesehatan

	n Domestik Regional Bruto Di Indonesia	memengaruhi secara langsung tanpa melalui PDRB.
Mar yanto, 2025	<i>Comparative analysis of the agricultural sector in Kupang City Using the Location Quotient (LQ) and Dynamic Location Quotient (DLQ) Approaches</i>	Rekomendasi kebijakan diarahkan pada penguatan pertanian perkotaan berbasis teknologi, perbaikan pengelolaan lahan kering, dan peningkatan sinergi kebijakan antarwilayah untuk mencapai pembangunan pertanian berkelanjutan di wilayah perkotaan NTT.
Zekki, dkk, 2025	<i>Determination of Location Quotient of Organic Agriculture in Türkiye</i>	Sistem pertanian organik yang terlokalisasi dan terintensifkan telah terbukti efektif dalam menghasilkan pendapatan tinggi per unit lahan, mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian, dan memastikan keberlanjutan.
Dita dkk, 2025	<i>Positioning of the Agricultural Sector in Banyumas Regency Using Location Quotient, Dynamic Location Quotient, and Klassen Typology Approaches</i>	Mengidentifikasi dan menganalisis posisi, potensi pertumbuhan, dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Penelitian ini menggunakan tiga metode analisis: Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Klassen Typology. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian bukanlah sektor unggulan di Kabupaten Banyumas
Norita dkk, 2025	<i>Shifting Shadows: A Location Quotient Analysis of Dynamic Drug Dealing and Addiction Patterns Within Police Station Boundaries in Kuala Lumpur</i>	Studi ini mengungkap pola dinamis aktivitas terkait narkoba di Kuala Lumpur dan Selangor, dengan titik-titik panas untuk penangkapan pemasok narkoba dan penangkapan kecanduan narkoba bergeser setiap tahun. Sementara upaya penegakan hukum dapat berkontribusi pada fluktuasi ini, analisis menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat tes narkoba positif yang tinggi tidak selalu

	<i>and Selangor</i>	selaras dengan daerah dengan aktivitas perdagangan narkoba yang tinggi. Kesenjangan ini kemungkinan mencerminkan motivasi yang berbeda dari pengedar narkoba (keuntungan) dan pecandu (kecanduan), serta jaringan mereka yang terpisah. Lebih lanjut, studi ini menyoroti konsentrasi yang signifikan dari pelanggaran terkait narkoba, khususnya di sepanjang perbatasan Selangor, yang menunjukkan kerentanan yang terkait dengan perbedaan dalam penegakan hukum dan pengembangan aksesibilitas.
Iqli ma dkk, 202 4	<i>Aceh Government Policy Analysis On Potential Of The Natural Resources Export Market</i>	Fokus penelitian ini adalah mengkaji potensi ekspor barang sumber daya alam di Provinsi Aceh, menentukan derajat produksi sumber daya alam tersebut, dan menganalisis sumber daya alam yang berpotensi untuk diekspor.
Ka mil ah, 202 1	<i>Analysis of Sector Economic Growth in East Java During The Covid-19 : Location Quotient and Shift Share Approach</i>	Hasil analisis dengan menggunakan pendekatan Location Quotient menunjukkan bahwa terdapat lima sektor yang merupakan sektor basis, yaitu sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; dan Informasi dan Komunikasi. Hasil analisis dengan menggunakan pendekatan shift-share menunjukkan bahwa seluruh 10 sektor dalam kurun waktu analisis menunjukkan angka negatif. Berdasarkan analisis Location Quotient dan Shift Share pada Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2020 dapat disimpulkan bahwa: sektor unggulan, berpotensi unggul (SLQ>1,

DLQ>1) dan Indeks Shift Share tertinggi terdapat pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan untuk yang termasuk dalam bukan sektor unggulan, tidak berpotensi unggul (SLQ<1, DLQ<1) dan Indeks Shift Share terkecil terdapat pada sektor Jasa Lainnya
--

Sumber : Diolah dari beberapa literatur

Meningkatkan potensi dari berbagai sektor adalah salah satu upaya mendorong pembangunan ekonomi (Dewi & Yasa, 2018). Tingkat pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah indikator seberapa besar suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa dalam periode tertentu, yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada level nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk level daerah. Data ini dapat dimanfaatkan untuk (a) mengevaluasi kinerja pertumbuhan ekonomi serta (b) mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat dan perkembangannya. Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa indikator utama Pembangunan ekonomi adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi, yang terjadi ketika aktivitas ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto, setiap wilayah menunjukkan setiap tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda akibat variasi dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, yang juga dipengaruhi oleh keadaan geografis dan sumber daya alam yang berbeda (Kusumaningrum, 2006).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu alat data ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menilai kinerja perkembangan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Pada dasarnya PDRB adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh entitas bisnis dalam suatu daerah tertentu atau merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di wilayah tersebut. Angka PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. (R. Jumiyan, 2018).

Dari beberapa literatur diatas, tergambarkan kebijakan pemerintah terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi daerah. Jumiyan (2018); Kusumaningrum (2006); Dewi&Yasa (2018); Tika dkk (2020); Iqlima (2024); Zeki dkk (2025); Kamilah (2021) menggunakan metode analisis Location Quotient (LQ) dan/atau Analisis Tipologi Klassen dalam menganalisis pertumbuhan daerah dengan variabel PDRB. Sintong (2018) menggunakan metode analisis jalur dalam meneliti variabel PDRB terhadap pengeluaran pada 15 pemerintah daerah yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Sedangkan Maryanto (2025) meneliti variabel PDRB dengan pendekatan *Location Quotient* dan *Dynamic Location Quotient* untuk melihat posisi dan dinamika sektor pertanian Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai sektor non-basis dan non-prospektif. Zeki dkk menemukan provinsi di Turki yang memiliki kluster

pertanian berkelanjutan yang menopang Pembangunan wilayah. Akan tetapi belum ada studi yang menganalisis kebijakan tambang dan agroindustri berkelanjutan terhadap struktur ekonomi daerah.

Studi ini menganalisis sejauhmana hasil kebijakan pemerintah daerah terhadap pergeseran atau transformasi ekonomi pasca tambang di Kaltim serta kebijakan Agroindustri di Kalimantan Timur dengan membandingkan kontribusi dan produktifitas sektor Pertambangan dan sektor Agroindustri yang direpresentasikan dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan (manufaktur) terhadap struktur ekonomi di Kalimantan Timur.

Theoretical Background

Teori Basis Ekonomi yang diungkapkan oleh Harry W. Richardson menyatakan bahwa elemen utama dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah berhubungan dengan permintaan terhadap barang dan Layanan dari luar, dimana sebuah daerah diharapkan memiliki sektor unggulan jika mampu bersaing dengan daerah lain dalam sektor yang sama (Kartikaningdyah, 2012). Sektor dasar memiliki kemampuan untuk Mendorong pertumbuhan ekonomi suatu kawasan serta segala aktivitas yang menghasilkan barang dan Layanan dari luar. Di sisi lain, sektor non dasar adalah komponen ekonomi yang memenuhi kebutuhan lokal dimana permintaan untuk sektor ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan Masyarakat setempat dan sektor ini selaras dengan realitas sosial yang ada

sehingga tidak dapat tumbuh melebihi perkembangan ekonomi regional (Wati & Arifin, 2019)

Menurut Glasson (1976:65), ekonomi regional; dapat dikategorikan menjadi dua jenis sektor, yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis (*basic activities*) merujuk pada aktivitas yang mengirimkan produk dan Layanan ke wilayah diluar area ekonomi Masyarakat tersebut atau yang menjual produk dan Layanan mereka kepada individu yang berasal dari luar regional ekonomi masyarakat yang dimaksud. Di sisi lain, sektor non-basis (*non-basic activities*) mencakup aktivitas yang menyediakan barang-barang yang diperlukan warga yang berdomisili di dalam batas wilayah ekonomi masyarakat tersebut. Aktivitas ini tidak melibatkan ekspor produk jadi; area produksi mereka dan pasar utama mereka bersifat lokal.

B. RESEARCH METHODS

Location Quotient (LQ) adalah perbandingan peran sektor/industri di suatu daerah terhadap peran sektor/industri tersebut secara nasional (Tarigan, 2014). Location Quotient adalah metode yang digunakan untuk menilai seberapa besar konsentrasi aktivitas ekonomi atau sektor tertentu di suatu wilayah dengan membandingkan kontribusinya dalam ekonomi lokal dengan kontribusi aktivitas ekonomi atau sektor yang sebanding pada level yang lebih tinggi.

Perhitungan LQ ini didasarkan pada nilai tambah (PDRB) suatu sektor tertentu yang dirumuskan sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{VA_{ij} / PDRB_j}{VA_{iI} / PDRB_I}$$

Dimana :

LQ_{ij} : LQ sektor I di kabupaten/ kota j

VA_{ij} : nilai tambah sektor I di kabupaten/ kota j

VA_{iI} : nilai tambah sektor I di tingkat Propinsi I

$PDRB_j$: PDRB di Kabupaten/ Kota j

$PDRB_I$: PDRB di tingkat Propinsi I

Dari perhitungan tersebut angka LQ ini mengindikasikan jika $LQ < 1$, maka daerah tersebut terkategori daerah non basis dimana sektor ekonomi hanya mampu memenuhi produksi di daerah yang bersangkutan, hanya menunjukkan kegiatan skala lokal, dan tidak cocok untuk kegiatan industri. Jika $LQ > 1$, maka daerah tersebut terkategori daerah basis, sehingga mampu mengeksport produksinya ke daerah lain.

Selanjutnya menggunakan metode kualitatif dengan membandingkan kebijakan pembangunan ekonomi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014-2018 dan tahun 2019-2024 untuk melihat kecenderungan pergeseran kebijakan politik terkait agroindustri dan ketahanan pangan di Kaltim.

C. RESULT AND DISCUSSION

Pada tahun 2008 Propinsi Kalimantan Timur memiliki 14 Kabupaten/ Kota, namun pada tahun 2012 mengalami pemekaran Propinsi

Kalimantan Utara, sehingga jumlah Kabupaten/ Kota di Kaltim berkurang menjadi 9 Kabupaten/ Kota, dan pada tahun 2013 terdapat penambahan satu Kabupaten baru yakni Kabupaten Mahakam Ulu sebagai pemekaran daerah dari Kabupaten Kutai Barat. Dalam pembahasan kajian ini, wilayah Kabupaten/ Kota yang akan dianalisis mengacu hasil pemekaran tahun 2012, mengingat ekonomi wilayah yang akan dilakukan perbandingan hanya pada Kabupaten/ Kota tersebut.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS Kaltim, 2021), pada tahun 2013 PDRB Migas Propinsi Kaltim sebesar 314.813.520,84 juta rupiah, sedangkan PDRB Tanpa Migas hanya sebesar 134.228.023,92 juta rupiah. Adapun Kabupaten/ Kota dengan kontribusi perekonomian tertinggi diduduki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total nilai PRDB Migas Sebesar 103.959.393,46 juta rupiah, sementara

Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daerah dengan penyokong perekonomian terendah dengan hanya menyumbang sekitar 2.769.209,24 juta rupiah.

Jika dibandingkan dengan hasil perolehan PDRB Kabupaten/ Kota di Propinsi Kaltim pada tahun 2024 terlihat bahwa PDRB Propinsi Kaltim sebesar 635.363.625,45 juta rupiah (BPS Kaltim, 2013). Adapun Kabupaten/ Kota dengan kontribusi perekonomian tertinggi masih diduduki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total nilai PRDB Sebesar 161.920.385,78 juta rupiah, sementara daerah dengan penyokong perekonomian terendah ditempati oleh Kabupaten Mahakam Ulu dengan hanya menyumbang sekitar 2.511.282,43 juta rupiah, secara lengkap komposisi PDRB Kabupaten/ Kota di Kaltim pada tahun tahun 2013, 2018, 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Perbandingan PDRB Kabupaten/ Kota di Kaltim tahun 2013, 2018, 2023 (dalam miliar rupiah)

No.	DAERAH	2013	2018	2023
1.	Kabupaten Mahulu	2.511,28	2.765,99	3.409,17
2.	Kabupaten Penajam Paser Utara	8.877,83	9.050,58	17.206,15
3.	Kabupaten Kutai Barat	28.353,17	27.169,27	39.336,03
4.	Kabupaten Berau	37.661,47	35.450,85	51.280,02
5.	Kabupaten Paser	47.948,71	43.234,51	59.217,25
6.	Kota Bontang	58.785,88	55.664,04	68.105,69
7.	Kota Samarinda	63.564,68	66.526,91	89.289,45
8.	Kota Balikpapan	97.699,38	103.918,75	143.169,19
9.	Kabupaten Kutai Timur	127.935,40	115.555,66	168.271,52
10.	Kabupaten Kutai Kartanegara	161.920,38	149.045,20	204.872,66
11.	Provinsi Kalimantan Timur	635.363,62	607.744,49	843.571,25

Sumber : (BPS Kaltim, 2021)

Batasan kajian ini hanya pada pergeseran dari sektor pertambangan dan penggalian sebagai penopang utama perekonomian Kaltim, dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor Agro pengganti pasca tambang, serta sektor manufaktur sebagai sektor hilirisasi pengolah hasil lanjutan produk tersebut. Berdasarkan

komposisi PDRB sektoral pada tahun 2013, 2018 dan 2023 tersebut selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus Location Quotient (LQ) sehingga diperoleh sektor basis pada masing-masing Kabupaten/ Kota. Adapun hasil perbandingan ketiga sektor tersebut disajikan dalam uraian tabel berikut :

Tabel 2. Perbandingan Hasil Analisis LQ Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur tahun 2013, 2018 dan 2023

Kabupaten/ Kota	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan			Pertambangan dan Penggalian			Industri Pengolahan		
	2013	2018	2023	2013	2018	2023	2013	2018	2023
Paser	1,32	1,3	1,70	0,67	1,6	1,55	0,01	0,24	0,32
Kutai Barat	1,28	1,72	1,75	0,5	1,11	1,14	0,02	0,31	0,33
Kutai Kartanegara	0,98	1,64	1,64	1,91	1,4	1,45	0,03	0,22	0,23
Kutai Timur	0,88	0,98	0,95	1,86	1,75	1,85	0,01	0,16	0,18
Berau	1,25	1,4	1,41	0,48	1,32	1,35	0,14	0,22	0,24
PPU	3,15	2,58	1,91	1,04	0,66	0,39	0,42	0,86	0,57
Balikpapan	0,35	0,12	0,11	0	0	0	1,84	2,58	2,65
Samarinda	0,19	0,23	0,19	0,07	0,29	0,25	0,27	0,43	0,38
Bontang	0,01	0,13	0,14	0	0,02	0,01	2,94	4,47	4,39
Mahulu		9,61	9,20		0,16	0,14		0,03	0,03

Sumber : data diolah

Jika melihat tabel hasil perbandingan hasil LQ diatas, pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, terlihat bahwa terjadi terdapat satu daerah yang mengalami pergeseran sektor basis yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan satu daerah pemekaran baru, sehingga terjadi penambahan dari empat Kabupaten/ Kota menjadi enam Kabupaten Kota yang memiliki sektor basis dibidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai representasi lapangan usaha sektor agro yang bersifat berkelanjutan, yakni Kabupaten Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu.

Sementara pada sektor Pertambangan dan Penggalian terjadi peningkatan tiga daerah yang mengalami pergeseran sektor basis, dari semula berjumlah tiga daerah yang menjadi sektor basis pada tahun 2013, meningkat menjadi lima daerah memiliki sektor basis pada lapangan usaha tersebut, yakni Kabupaten Paser, Kutai Barat dan Berau, sedangkan Kabupaten PPU justru mengalami pergeseran negatif.

Berdasarkan hasil data tersebut menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten/ Kota di wilayah Propinsi Kalimantan Timur masih bergantung

pada sektor ekonomi ekstraktif yakni pada sektor pertambangan dan penggalian, hal ini terlihat dari adanya pergeseran sektor basis pada Kabupaten/ Kota yang mengalami kenaikan jumlah dari 3 kabupaten/ Kota menjadi lima Kabupaten Kota.

Namun demikian kebijakan pengalihan perkembangan ekonomi

yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi untuk tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan menjadi sektor agro industri, tidak sepenuhnya gagal, hal ini terlihat dari meningkatnya sektor basis pada lapangan usaha dibidang agro yakni dibidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kebijakan tahapan perencanaan pembangunan Kaltim dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Tujuan Pembangunan di Kalimantan Timur berdasarkan RPJMD tahun 2013-2018 dan 2019-2023

RPJMD 2013-2018	RPJMD 2019-2023
2014 : Penguatan daya saing daerah berbasis SDA terbarukan didukung penguatan manajemen Sumberdaya aparatur 2015 : Penyiapan Industrialisasi produk unggulan daerah dan pengembangan energi baru terbarukan 2016 : Meningkatkan nilai tambah ekonomi produk unggulan daerah dan pemantapan konektivitas intra dan antar wilayah 2017 : Pemantapan Industri hilir untuk mewujudkan struktur ekonomi yang berkualitas 2018 : Penguatan Ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang adil dan merata	2019 : Memperkuat Daya Saing Investasi untuk mempercepat hilirisasi industri 2020 : Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan teknologi dan Infrastruktur wilayah yang menambah nilai tambah ekonomi 2021 : Menumbuhkan Industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan 2022 : Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan untuk mengurangi kesenjangan dan memperluas pasar komoditas 2023 : Penguatan Pasar produk-produk unggulan untuk menampung hasil produksi kaltim

Sumber : RPJMD Kaltim 2013-2018, 2019-2023

Jika kita membandingkan dengan kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, yang berupaya untuk melakukan diversifikasi daya saing daerah tidak hanya bergantung pada sektor Pertambangan, tetapi juga berupaya meningkatkan melalui SDA terbarukan serta proses industrialisasi produk unggulan daerah, serta pemantapan industri hilir sebagai pondasi struktur ekonomi Kaltim, tampak bahwa target pembangunan masih belum signifikan

tercapai. Struktur ekonomi Kaltim berdasarkan PDRB menunjukkan bahwa dominasi sektor Pertambangan dan Penggalian masih belum bergeser sebagai sektor unggulan di Kaltim, sementara sektor Agro industri (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Manufaktur) masih belum memberikan kontribusi yang optimal sebagai sektor alternatif yang mampu meningkatkan daya saing daerah berbasis SDA terbarukan.

Konsep hilirisasi sebagaimana tertuang pada RPJMD 2019-2023,

semestinya menjadikan peningkatan pada sektor industri pengolahan/manufaktur sebagai lanjutan peningkatan nilai tambah bahan mentah menjadi produk olahan. Dari sepuluh kabupaten/ kota, hanya dua daerah yang memiliki sektor manufaktur yang cukup berkembang baik, yakni Kota Bontang dan Balikpapan, namun sektor tersebut merupakan industri hilir dari sektor minyak dan gas serta kimia dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pada sektor manufaktur relatif belum terjadi perubahan yang signifikan, dimana produktifitas perekonomian di Kaltim masih terbatas pada bahan mentah, dan belum dapat ditingkatkan pada sektor industri hilir yang memiliki nilai tambah.

D. CONCLUSION, LIMITATIONS AND RECOMMENDATIONS

Conclusion

Bahwa Perkembangan Perekonomian Kabupaten/ Kota di Propinsi Kalimantan Timur secara umum masih didominasi oleh sektor Migas dan Pertambangan sebagai sektor utama, hal ini terlihat dari hasil perhitungan LQ pada masing-masing Kabupaten/ Kota menunjukkan bahwa sektor pertambangan memperoleh nilai $LQ > 1$, sehingga sektor tersebut masih merupakan sektor basis yang memiliki nilai tambah bagi daerah tersebut.

Meskipun sektor migas dan pertambangan masih menjadi sektor utama Kabupaten/ Kota di Kaltim, namun terdapat peningkatan yang signifikan pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta manufaktur sebagai imbas dari kebijakan pemerintah daerah, dimana pada

beberapa daerah menunjukkan nilai LQ pada sektor tersebut mengalami pergeseran dengan nilai $LQ > 1$, sehingga daerah-daerah tersebut potensial untuk dikembangkan sektor lainnya.

Berdasarkan analisis LQ, secara umum ekonomi di Kalimantan Timur masih bergantung pada sektor ekonomi ekstraktif yakni sektor pertambangan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cukup potensial untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu ekonomi basis wilayah dalam rangka pemenuhan ketahanan pangan. Sektor manufaktur sebagai bentuk hilirisasi industri masih belum dikembangkan secara optimal dalam mengungkit perekonomian daerah. Kebijakan pembangunan pemerintah daerah pada periode 2013-2018 dan 2019-2023 telah berupaya mendorong terwujudnya transformasi ekonomi pasca tambang, melalui optimalisasi nilai tambah komoditas lokal melalui industrialisasi/ hilirisasi produk

Research Limitation

Studi ini terbatas dalam ruang lingkup dan waktu penelitian karena periode analisis pada dua periode RPJMD atau dua periode kepemimpinan kepala daerah yaitu 2013-2018 dan 2019-2023 sehingga perlu riset selanjutnya yang menganalisis pada periode RPJMD selanjutnya.

Suggestions and Recommendations

Rekomendasi kebijakan adalah perlunya peta jalan transformasi ekonomi pasca tambang dan mendorong pengembangan klaster ekonomi baru berbasis agroidustri, bioenergi dan

industri pangan untuk mengurangi komoditas ekstraktif.

REFERENCES

Click or tap here to enter text.

- Sintong,A(2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dengan IPM tinggi, Sedang dan Rendah), Indonesian Treasury Review, Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Volume 3 No 4 (2018) Hal 270-283.
https://www.researchgate.net/publication/330111664_Analisis_Pengaruh_Pengeluaran_Pemerintah_Terhadap_Indeks_Pembangunan_Manusia_Melalui_Pendapatan_Domes tik_Regional_Bruto_di_Indonesia
- Zeki et.al .(2025). Determination of Location Quotient of Organic Agriculture in Türkiye. *Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi* 22(1):58-73. DOI [10.33462/jotaf.1367319](https://www.researchgate.net/publication/388017810_Determinatio n_of_Location_Quotient_of_Organi c_Agriculture_in_Turkiye).
https://www.researchgate.net/publication/388017810_Determinatio n_of_Location_Quotient_of_Organi c_Agriculture_in_Turkiye
- Norita Jubit et.al (2025). Shifting Shadows: A Location Quotient Analysis of Dynamic Drug Dealing and Addiction Patterns Within Police Station Boundaries in Kuala Lumpur and Selangor. *International Journal of Geoinformatics*.
https://www.researchgate.net/publication/392514842_Shifting_Shadows_A_Location_Quotient_Analysis_of_Dynamic_Drug_Dealing_and_Addiction_Patterns_Within_Polic e_Station_Boundaries_in_Kuala_L umpur_and_Selangor? tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6In NIYXJjaCIsInBvc2l0aW9uIjoicGFn ZUhYWRlciJ9fQ
- Nur Aulia, et.al (2025). Positioning of the Agricultural Sector in Banyumas Regency Using Location Quotient, Dynamic Location Quotient, and Klassen Typology Approaches. *E3S Web of Conferences* 665, 01046 (2025).
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202566501046>.
https://www.researchgate.net/publication/397760651_Positioning_o f_the_Agricultural_Sector_in_Bany umas_Regency_Using_Location_Q uotient_Dynamic_Location_Quoti ent_and_Klassen_Typology_Appro aches? tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpc nN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InNIYXJjaCIsInBvc2 l0aW9uIjoicGFnZUhYWRlciJ9fQ
- Azhar, I., & Fajriah, A. N. (2024). Aceh Government Policy Analysis On Potential Of The Natural Resources Export Market. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 14(01), 68–80. Retrieved from <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/260>
- Tarigan, R (2014). *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*, Jakarta. PT Bumi Aksara.